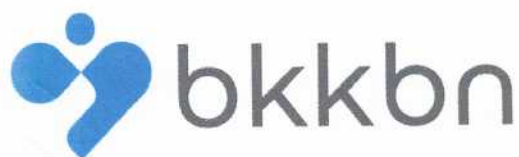


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2020

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Unit Kerja | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan |
| 2 Bidang | : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 Seksi | : Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 4 Program | : Penguatan Kelembagaan |
| 5 Kegiatan | : Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli KKBPK |
| 6 Dana Awal | : Rp. 43.022.500,00,- |
| Setelah refocusing | : Rp. 1.157.500 |
| 7 Lokasi | : 15 Kecamatan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan |
| 8 Tahun | : 2020 |



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang mendapat mandat dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita), yaitu agenda prioritas ke-3 “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “, serta agenda prioritas ke-8, “ melakukan revolusi karakter bangsa” diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat luas melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Salah satunya melalui program Penguatan Kelembagaan Kegiatan Membangun Jaringan dengan Institusi Peduli KKBPK

Keluarga merupakan institusi dan komunitas terkecil masyarakat yang menjadi dasar persemaian nilai-nilai sosial, agama, moral dan pembentukan karakter bangsa, maka berpijak dari keluargalah karakter bangsa terbentuk karena dari komunitas terkecil ini ditanamkan pendidikan nilai-nilai kepribadian seperti hak dan kewajiban, kedisiplinan, kerja sama, kebaikan, kejujuran, solidaritas, berempati dan karakter positif lainnya.

Sehubungan dengan hal itu juga, sejak 1994 pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Tujuannya adalah untuk mengajak seluruh anggota keluarga Indonesia melakukan introspeksi dan berbenah diri guna berbuat yang terbaik bagi keluarganya. Karena, fakta yang tak dapat dipungkiri, timbulnya permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia berawal dalam pembentuk karakter dari mudarnya pemahaman masyarakat bahwa keluarga memegang peran amat penting dalam pembentuk karakter

bangsa. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi peran keluarga Indonesia.

Sedangkan PLKB/PKB juga sangat berperan penting, yang mana perpanjangan tangannya adalah kader atau Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah organisasi kelompok maupun perseorangan yang mempunyai peran sebagai mitra PLKB dalam pengelolaan Program Kependudukan dan KB dilapangan, IMP ini sering disebut dengan istilah Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPKBD). Antara PLKB dan IMP tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan program KB dilapangan, karena mereka merupakan motor penggerak terdepan suksesnya Program KB selama ini. Kelompok – kelompok yang telah dibentuk untuk menyukseskan program KB ini diantaranya adalah BKB, BKR, BKL, UPPKS.

B. Tujuan

1. Umum

Mengembangkan kreativitas dan keterampilan serta menumbuhkan semangat baru dalam rangka peningkatan komitmen Lini Lapangan dan Kelompok – kelompok yang telah dibentuk untuk menyukseskan program KKBPK. Dan melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah.

2. Khusus

- a. Meningkatnya kepedulian dan peran aktif semua stake holder dan mitra kerja untuk terus menerus secara berkesinambungan akan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam upaya membangun Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan Berkualitas.

- b. Meningkatkan kualitas dan Pengetahuan IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Poktan) dalam pelaksanaan KIE program Kependudukan dan KB kepada masyarakat ditingkat lini lapangan.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kesertaan masyarakat dalam ber-KB.
- d. Meningkatnya motivasi masyarakat dalam pengembangan kegiatan-kegiatan melalui wadah kelompok-kelompok kegiatan yang ada seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS dalam mendukung program Bangsa Kencana.

C. Sasaran

- PPKBD
- Sub PPKBD
- Kelompok – kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)
- Petugas Lapangan KB
- Unsur-unsur terkait dengan Program Bangsa Kencana

II. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang -undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tanggal November 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 6 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 37 tanggal 31 Desember Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Nomor : 900/ 26 / Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun Anggaran 2020
13. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan No: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas PMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Sebagai gambaran umum pada Kegiatan Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini, Jumlah Kelompok Kegiatan pada Tahun 2020 sesuai dengan data yang ada pada aplikasi SIGA per 30 Des 2020 untuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat sbb:

No	KECAMATAN	Jumlah				
		BKB	BKR	BKL	UPPKS	PIK-R
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KOTO XI TARUSAN	20	3	20	19	11
2	BAYANG	5	2	3	2	4
3	IV NAGARI BAYU	0	0	0	0	0
4	IV JURAI	12	4	6	4	8
5	BATANG KAPAS	31	9	9	12	9
6	SUTERA	8	3	5	1	5
7	LENGAYANG	10	6	3	3	2
8	RANAH PESISIR	13	4	10	6	2
9	L.S. BAGANTI	22	11	18	4	3
10	PC. SOAL	4	3	3	1	0
11	AIR PURA	8	7	7	1	1
12	RANAH A. HULU	10	5	6	1	0
13	BAB.TAPAN	9	8	9	1	1
14	LUNANG	14	9	8	2	1
15	SILAUT	7	0	7	1	1
	KABUPATEN	173	91	116	56	48

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini, Puncak kegiatannya yaitu di bulan Juni sejalan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tanggal 30 Juni setiap tahunnya. Namun kegiatan ini tidak jadi terlaksana disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 dan anggaran yang tersedia difokuskan.

Pekerjaan yang direncanakan dalam kegiatan ini adalah :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Penilaian KB Lestari 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun, Orang Tua Hebat dan Poktan BKB, BKR, BKL, IMP, PIK R/M, dan UPPKS Tk. Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengikuti Jambore Saka Kencana / GenRe Fellowship tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Besarnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan jambore menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan menjadi gambaran bahwa kekuatan lini lapangan dan pengetahuan/ keterampilan program dan Kegiatan merupakan barisan terdepan suksesnya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3. Melaksanakan Peringatan Harganasda tingkat Kab.Pesisir Selatan.

Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi agar lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan cakrawala baru bagi peserta dalam pengembangan diri dan kelompoknya.

4. Mengikuti Peringatan Harganas tingkat Prov.Sumatera Barat dan tingkat Nasional.

5. Kegiatan Pembinaan

Kegiatan Pembinaan dilakukan secara berkesinambungan kepada kelompok masyarakat baik kepada kelompok- kelompok kegiatan

yang ada, seperti : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) maupun kelompok PIK-R yang ada disekolah-sekolah dan Kelompok-Kelompok UPPKS.

C. Dukungan Anggaran dan Realisasi

Untuk Kegiatan Membangun Jaringan Kemitraan dengan Insitusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2020, dari DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 di awal tahun anggaran dialokasikan Dana APBD sebesar Rp. 43.022.500,- Namun hanya terealisasi sebesar Rp. 1.157.500,- atau 0,03 % yaitu untuk menghadiri Rakor yg dilaksanakan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kegiatan puncak yang jadwal pelaksanaannya dibulan Juni dan Juli tidak dapat dilaksanakan karena situasi Pandemi Covid-19.

Adapun rincian realisasi anggaran sbb:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas	257.500,-
2	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000,-
3	Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	800.000,-
	Jumlah	1.157.500,-

IV KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun pada prinsipnya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan dukungan anggaran yang ada, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Namun karena situasi dan kondisi Pandemi yang dialami rata-rata seluruh lapisan menyebabkan kegiatan Membangun jaringan kemitraan dengan institusi peduli kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Kegiatan Membangun jaringan kemitraan dengan institusi peduli kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2020.

Painan, Desember 2020

PPTK

Kuasa Pengguna Anggaran



IRWANSTAH, SKM, MPH

NIP. 19640923 198903 1 007



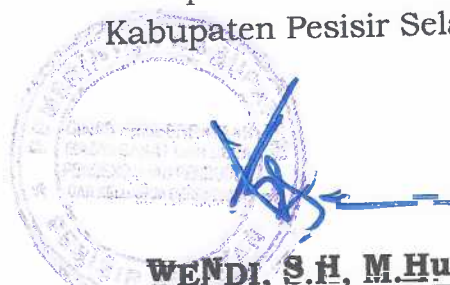
DEVI NURITA, S.E., M.Si

NIP. 19730101 199701 2 001

Mengetahui/ Menyetujui :

Kepala DPMDPP&KB

Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, S.H., M.Hum

NIP 19760407 199803 1 005